



JURNAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA VOL. 13 No. 2, Th. 2022 (148-158)

(Print ISSN 2613-9561 Online ISSN 2686-245X)

Tersedia online di https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap

STUDI ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI PROVINSI JAWA BARAT

Received: 23 Juli 2022; Revised: 25 Agustus 2022; Accepted: 30 September 2022

Permalink/DOI: https://doi.org/10.23887/jurnal_ap.v13i2.1465

H. Sangganagara

Manajemen Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

e-mail: harjoko.sangganagara@gmail.com

Abstrak

Alokasi anggaran pendidikan dasar yang relatif kecil di Provinsi Jawa Barat menjadi masalah bagi peningkatan mutu pendidikan dasar yang secara normatif tertuang dalam beberapa dokumen rencana dan peraturan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Dari sudut pandang tersebut, muncul beberapa pertanyaan penelitian: bagaimana dengan kemampuan pembiayaan pemerintah, apa yang menjadi prioritas alokasi anggaran pendidikan, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, bagaimana hasil implementasi kebijakan alokasi anggaran dan apa dampak implementasi kebijakan alokasi anggaran terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kajian dilakukan dengan mengamati proses kebijakan alokasi anggaran pendidikan; implementasi kebijakan; pencapaian mutu pendidikan dasar, dalam penggunaan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Metode post policy analysis digunakan untuk menganalisis fenomena kebijakan alokasi anggaran di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan kebijakan sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun belum efektif. Disimpulkan bahwa hasil kebijakan alokasi anggaran relatif meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Rekomendasinya adalah bahwa anggaran harus lebih banyak diberikan untuk pendidikan dasar dan alokasi anggaran membutuhkan beberapa prioritas terutama dalam penyediaan infrastruktur sekolah, guru yang berkualitas dan biaya personal. Sementara itu, beberapa program harus dipertajam ke arah peningkatan kualitas. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilanjutkan hingga wajib belajar selesai.

Kata kunci : alokasi, penganggaran, kebijakan, pendidikan dasar.

Abstract

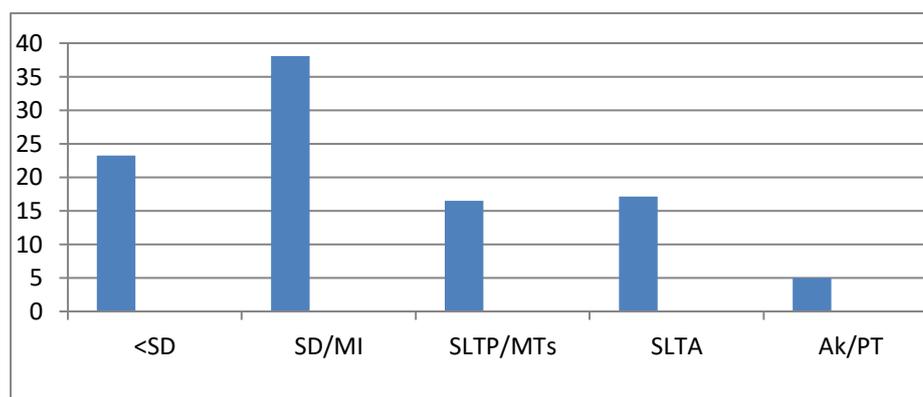
The relatively small budget allocation of basic education in the West Java Province becomes a problem for improving the quality of based basic education as normatively stated in some documents of local development plans and regulations. Effective implementation of the policy is needed for improving basic education quality. From those points of view, there are some research questions : how about the financing ability of the government, what is the priority of educational budget allocation, how to use the budget, what is the result of the implementation of budget allocation policy and what is the impact of budget allocation policy implementation for improving the educational quality. The study was conducted through observing the process of educational budget allocation policy; the implementation of the policy; the achievement of basic education quality, in the use of using interview, library research and observation method. The method of post policy analysis was used to analyze the phenomenon of budget allocation policy in West Java Province. The result showed that the performance of the government of the West Java Province in implementing policy had been matched according to the principles of proportionality, efficiency and accountability but was not effective yet. The conclusion is that the result of budget allocation policy had relatively improved the quality of basic education. The

recommendation is that more budgets must be given to basic education and budget allocation needs some priorities especially in providing school infrastructures, qualified teachers and personal cost. Meanwhile, some programs must be sharpened into quality improvement direction. Role sharing between national and local government needs to be continued until the compulsory education is accomplished.

Keywords : allocation, budgeting, policy, basic education.

PENDAHULUAN

Secara umum derajat pendidikan dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Artinya semakin banyak penduduk yang menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka hal tersebut sudah mengarah pada indikasi adanya peningkatan kualitas SDM. Selain itu derajat pendidikan dilihat secara luas, yaitu meliputi pendidikan formal maupun non-formal.



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Jawa Barat Tahun 2007.
(Sumber :Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2008)

Berdasarkan data tahun 2007 pada Grafik 1, penduduk Jawa Barat kebanyakan baru menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SD, yaitu 38,07%, bahkan 23,27% tidak tamat SD. Persentase penduduk yang tamat SLTP atau SLTA hampir sama yaitu 17%, sedangkan yang menamatkan jenjang akademi atau universitas sekitar 5%. Sementara data BPS (Maret 2009) menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Barat baru mencapai 7,91 tahun, yang berarti pendidikan dasar sembilan tahun belum tercapai. Gaffar dalam Ali dkk. (2007:568) menyatakan bahwa “usaha untuk melanjutkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun” dan “peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan peningkatan fungsi-fungsi pengawasan” merupakan bagian dari “agenda mendasar ...untuk memajukan sistem pendidikan nasional” .

Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun memerlukan upaya-upaya yang terintegrasi dalam program-program pembangunan pendidikan yang membutuhkan belanja langsung maupun tidak langsung baik pada tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota /Kabupaten. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan kebijakan alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan ketersediaan sumber pembiayaan pendidikan yang merupakan bagian integral dari APBN maupun APBD sebagai implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan.

Menurut Thomas dalam Encyclopedia Americana Vol. 9 , besaran anggaran pendidikan berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda di tiap Negara dan daerah. Di Israel mencapai 17% dari APBN, Jepang 6,5%, Inggris 4,6% dan Bangladesh 0,01% (2001:736). Sedangkan besaran anggaran pendidikan di Indonesia sejak akhir dasawarsa 90-an mencapai 20% dari APBN, termasuk gaji guru di dalamnya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tersebut menyiratkan sebuah diskresi dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

Pada tahun 1999/2000 anggaran pendidikan di Jawa Barat baru mencapai 7,57% dari APBD. Hingga tahun 2008 alokasi anggaran untuk pendidikan baru mencapai 11% dari total APBD, itu artinya baru mencapai besaran Rp 800 miliar dari Rp7 triliun APBD. Karena kuatnya tuntutan masyarakat dan dorongan anggota DPRD pada tahun 2009 menjadi 20% dari APBD atau Rp 1,6 triliun dari Rp 8 triliun besaran APBD. Meskipun demikian alokasi anggaran ternyata lebih banyak digunakan biaya manajemen dibanding untuk membiayai pendidikan dasar, menengah, luar sekolah dan luar biasa. Alokasi anggaran untuk pendidikan dasar hanya Rp 111,99 miliar. Itu berarti kurang dari 10%, padahal menurut Bank Dunia pada umumnya negara-negara Asia mengalokasikan dana pemerintah untuk pendidikan dasarnya mencapai 48%, bahkan di Amerika Serikat mencapai 51% (Fattah dalam Ali, 2007:596).

Masalah bagi stakeholder pendidikan di Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana agar alokasi yang relatif kecil tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat pada waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun (wajar dikdas sembilan tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan bermutu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya (cost) harus diletakkan dalam formulasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana implementasi suatu kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat. Jika masalah ini tidak diteliti dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena dari implementasi kebijakan dan dapat memberikan rekomendasi, baik berupa solusi maupun continuous improvement.

Karena penelitian ini menyoroti suatu kebijakan maka penelitian ini berada pada studi analisis kebijakan. Dengan demikian penelitian ini berada pada tataran makro. Penelitian pada tingkat makro menjadi penting untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber dana alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. (2) Pemanfaatan anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat. (3) Hasil dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat. (4) Dampak dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat.

METODE

Masalah pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Karena itu tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk menguji suatu hipotesis namun ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeksplorasian fakta dan data lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian pendekatan penelitian yang dianggap cocok digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif (Nasution, 1988).

Namun demikian untuk mendalami setiap permasalahan yang diteliti sehingga pemecahannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan akhirnya memberikan sumbangan yang berarti bagi maksud dan tujuan penelitian, diperlukan kajian secara mendalam sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti. Penelitian bukan sekedar mendeskripsikan realitas sosial, tetapi perlu analisis- analisis yang bersifat prediktif, maka metode yang paling

dianggap sesuai dengan konteks masalah yang diteliti digunakan metode penelitian analisis kebijakan atau metoda post policy analysis (MacMillan & Schumacher, 2001:526-581). Sedangkan analisis kebijakan yang digunakan adalah analisis keefektifan biaya.

Studi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis maupun teori tertentu, melainkan berupaya untuk menelusuri pemahaman baru mengenai fenomena yang dikaji. Cara kerja dari studi ini bersifat : subyektifitas ke obyektifitas, induksi ke deduksi dan konstruksi ke enumerasi. Untuk itu peneliti memperlakukan diri sebagai instrument utama (human instrument), yang bergerak dari hal-hal spesifik, dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dan memadukan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan dapat ditemukan. Dengan sifatnya yang demikian maka studi ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan Metode Naturalistik dengan Pendekatan Kualitatif.

Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Barat. Subyek yang diteliti adalah para pejabat eksekutif dan legislatif dan praktisi pendidikan serta stakeholders (pemangku kepentingan) yang dipilih secara non sampling. Pertimbangan pemilihan lokasi adalah mengingat strategisnya posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Provinsi Jawa Barat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kinerja pemerintahan dan pembangunannya, yang di dalamnya termuat komponen tingkat pendidikan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya insani. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan. Sedangkan pembangunan kebudayaannya diprioritaskan pada revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Upaya untuk meningkatkan kontribusi dari komponen pendidikan dilakukan antara lain dengan meningkatkan anggaran pendidikan menuju besaran 20% sebagai amanat konstitusi. Itu berarti 20 % dari APBD Provinsi Jawa Barat yang besarnya mencapai Rp 8,29 trilyun (Bewara, Edisi I/2009, 8), suatu jumlah anggaran yang besar bahkan jika dibandingkan dengan anggaran provinsi-provinsi lain di luar DKI Jaya. Secara khusus Provinsi Jawa Barat memberlakukan tiga buah Peraturan Daerah tentang kebudayaan daerah yang diimplementasikan melalui pendidikan sebagai bentuk kebijakan berkenaan dengan kearifan lokal Jawa Barat sehingga menarik untuk diteliti.

Adapun unit-unit analisis ialah : (1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Tim Penyusun Anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (3) Kepala Sekolah dan Guru SD maupun SMP di beberapa tempat di Provinsi Jawa Barat. (4) Dokumen-dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering dijadikan parameter otonomi daerah. PAD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 mencapai Rp 5,564 triliun dan jika dilihat dari struktur APBD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 70,75%. PAD berasal dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 yang belum diaudit BPK RI adalah sebesar Rp 7,723 triliun dan dana bagi belanja pendidikan sebesar Rp 1,628 triliun, kurang lebih 20% dari APBD nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Barat sudah menjalankan otonomi daerahnya di bidang pendidikan dengan baik.

Kendatipun demikian alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebenarnya masih lebih banyak ditopang oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang mencapai Rp 4,5 triliun, hampir 300% alokasi anggaran pendidikan Provinsi. Dalam menjalankan tugas umum pemerintahan maka Pemerintah Provinsi memperhatikan dan membantu Kota dan Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat selain karena tuntutan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 94,

PP Nomor 50 Tahun 2007, Permendagri Nomor 22 Tahun 2009) juga karena kemampuan keuangan Kota/Kabupaten yang beragam.

Prioritas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat

Kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk menuntaskan Jawa Barat bebas buta aksara; mewujudkan Jawa Barat bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; mewujudkan Jawa Barat bebas putus jenjang sekolah dalam rangka pelaksanaan wajar dua belas tahun di seluruh Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan Guru serta tenaga kependidikan; meningkatkan revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.

Prioritas alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat berada pada common goals yang pertama yaitu “peningkatan kualitas dan produktivitas SDM yang sarannya antara lain meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat” dan diarahkan untuk meningkatkan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan merealisasikan “Jabar Bebas Putus Jenjang Pendidikan”.

Pemanfaatan Anggaran Pendidikan

Sebanyak 89,04% anggaran pendidikan yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat dialokasikan untuk Belanja Langsung dan Bantuan sedangkan 10,96% dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung dan Bantuan seluruhnya berjumlah Rp 1,450 triliun lebih, dibagi ke dalam Belanja Langsung sebesar Rp 472,937 miliar lebih dan Bantuan sebesar Rp 977,257 miliar lebih. Sedangkan Belanja Tidak Langsung seluruhnya berjumlah Rp 178,484 miliar lebih digunakan untuk Gaji PNS Dinas Pendidikan dan Gaji/Tunjangan Guru Pendidikan Luar Biasa sebesar Rp 168,759 miliar lebih dan Insentif Guru Madrasah Diniyah (Pendidikan Keagamaan) sebesar Rp 12,108 miliar lebih.

Belanja Langsung adalah untuk membiayai program dan kegiatan termasuk sumbangan buku pelajaran, sedangkan Bantuan adalah berupa uang yang diberikan untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) mendampingi BOS yang berasal dari APBN, bantuan untuk seragam serta beasiswa. Belanja Langsung tidak hanya untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan yang ditangani oleh Disdik tetapi juga ada juga di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lain seperti Disbudpar, Dinas Pertanian, Dinas KUKM, Dinas Naker serta Badiklatda yaitu untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat di luar persekolahan.

Dari anggaran pendidikan Rp 1,6 triliun tersebut belanja yang dikelola Dinas Pendidikan hanya sekitar Rp 507 miliar saja dan yang dialokasikan untuk program pendidikan dasar adalah Rp. 111,99 miliar. Anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diimplementasikan melalui program dan non program. Dalam program maka program dielaborasi ke dalam program bantuan maupun kegiatan baik yang berada di Dinas Pendidikan maupun di OPD lainnya. Sedangkan yang non program berada dalam wilayah diskresi Gubernur untuk mengeluarkan anggaran yang belum ditentukan programnya.

Pemerintah Provinsi memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang berasal dari APBN yang dikelola pemanfaatannya oleh Dinas Pendidikan. Komponen anggaran yang terbesar diberikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) yaitu sebesar Rp 2,843 triliun dan Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru Rp 1,173 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu para Guru.

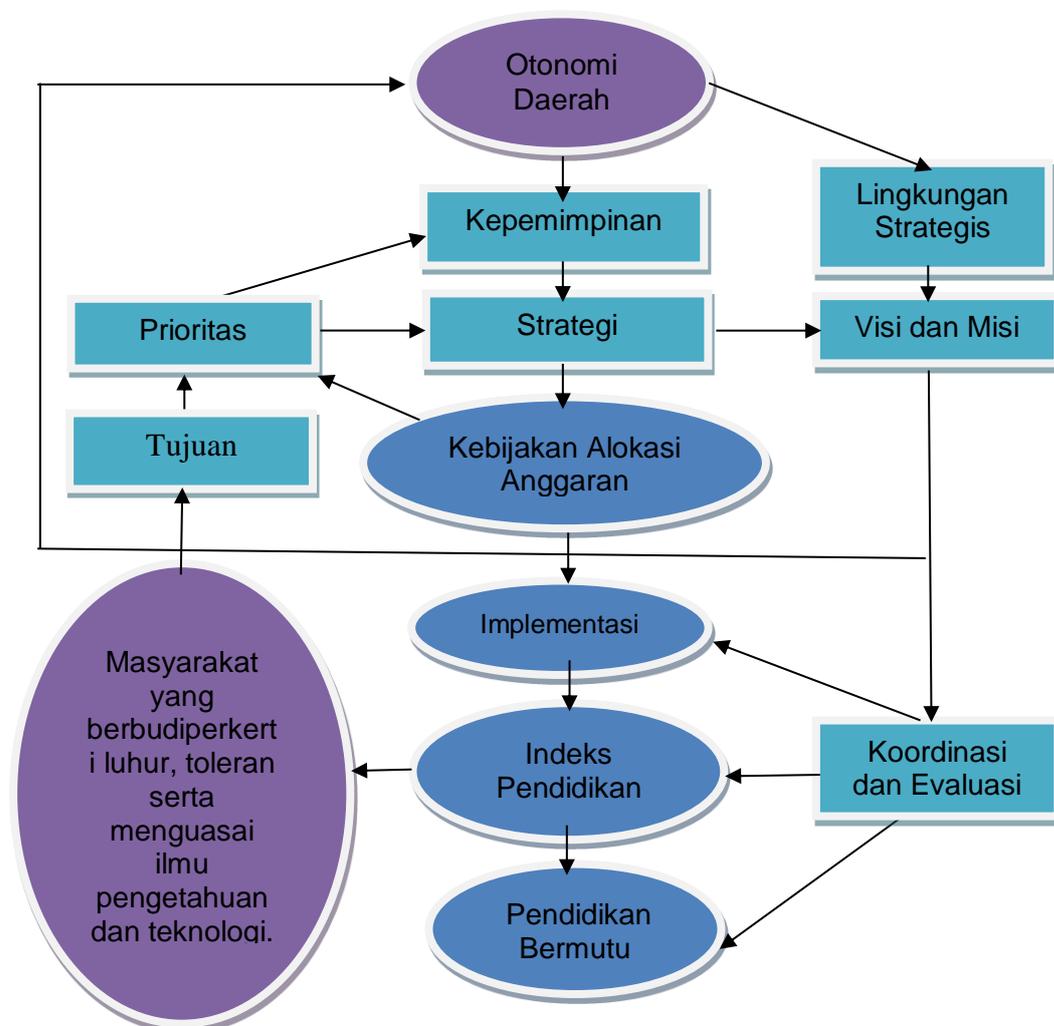
Hasil dari Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar (1) Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar, peningkatan tata kelola pendidikan yang efektif dan penguasaan /pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dikategorikan ke dalam verifikasi, monitoring, evaluasi; koordinasi; workshop/semiloka; rapat-rapat koordinasi; peningkatan mutu layanan pendidikan dan bantuan. (2) Tercapainya keluaran fisik dan non

fisik serta bantuan keuangan seperti peningkatan sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Sekolah Provinsi, bantuan pengadaan buku rapor, bantuan buku, bantuan pakaian untuk siswa, dan bantuan untuk guru (3) Terlaksanakannya akuntabilitas karena dalam menjalankan pengendalian digunakan instrument yang dinamakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan). LAKIP yang dibuat menggambarkan input, proses, output, dan outcomes dari setiap kegiatan di bidang pendidikan.

Dampak Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan

Ada peningkatan mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pendidikan untuk tahun 2009 yang meningkat dari 80,35 pada tahun 2008 menjadi 80,58 pada tahun 2009 atau meningkat 0,23 poin meskipun belum mencapai target yang tertuang dalam RKPD yaitu sebesar 82,02 poin . Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,58 tahun berada di atas rata-rata nasional yaitu 5,7 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 95,60%, sehingga Angka Buta Huruf turun dari 5,33% menjadi 4,4%.

Model Alternatif Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Jawa Barat



Gambar 2. Alternatif Model Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan

Strategi yang digunakan untuk model alternative adalah bahwa kebijakan alokasi anggaran pendidikan harus dapat: (1) Mendorong tingkat pendidikan masyarakat (melalui implementasi kebijakan di bidang ketenagaan, pembiayaan, sarana dana prasarana,

partisipasi masyarakat); dan (2) Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (melalui implementasi kebijakan di bidang kurikulum).

Sasaran yang ingin dicapai dengan strategi tersebut adalah: (1) Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar Sembilan tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; (2) Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama; (3) Meningkatnya implementasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal; (4) Meningkatnya sikap saling menghargai dan menghormati berbagai komunitas budaya.

Alternatif model mengadopsi kerangka manajemen strategik, pertama, melakukan environmental scanning (analisis lingkungan) yang terdiri dari analisis lingkungan eksternal (ALE) dan analisis lingkungan internal (ALI). Kedua, strategy formulation (perumusan strategi) yaitu kegiatan perumusan misi, menentukan tujuan, membuat prioritas, membuat strategi, dan membuat kebijakan. Ketiga, strategy implementation (menjalankan strategi yang telah dibuat) yaitu menyusun program, menganggarkan, serta membuat prosedur. Keempat, evaluation and control (evaluasi dan pengawasan) yaitu kegiatan monitoring terhadap kinerja organisasi kemudian melakukan koreksi yang diperlukan.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa hasil kebijakan alokasi anggaran relatif meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk menuntaskan Jawa Barat bebas buta aksara; mewujudkan Jawa Barat bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; mewujudkan Jawa Barat bebas putus jenjang sekolah dalam rangka pelaksanaan wajar dua belas tahun di seluruh Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar; meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan Guru serta tenaga kependidikan; meningkatkan revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat. Rekomendasinya adalah bahwa anggaran harus lebih banyak diberikan untuk pendidikan dasar dan alokasi anggaran membutuhkan beberapa prioritas terutama dalam penyediaan infrastruktur sekolah, guru yang berkualitas dan biaya personal. Sementara itu, beberapa program harus dipertajam ke arah peningkatan kualitas. Pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilanjutkan hingga wajib belajar selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab dan Kusumastuty, Dyah. (2009). Penjaminan Mutu. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Abdul Wahab, Solichin. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Mohammad dalam Ali dkk. (2007). Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung : Pedagoginana Press.
- Alisyahbana, Armida S. (2005). "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan". Artikel. [Online]. Tersedia : http://www.geocities.com/arief_anshory/otda_pendidikan.pdf [20 Mei 2010].
- Alma, Buchari & Hurriyati, Ratih. (2008). Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima. Bandung: Alfabeta.
- BAN-SM. (2010). Akreditasi Sekolah Dasar dan Madrasah. [Online]. Tersedia : <http://www.ban-sm.or.id/statistik> [3 Februari 2011].
- Card, David. (----). "Returns to Schooling," dalam The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
- Cecchi, Daniele. (2006). The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality.

- Christopher, Williams. (2006). *Leadership Accountability in a Globalizing World*. London: Palgrave Macmillan.
- Clark, David et. Al. *Financing of Education in Indonesia*. Manila: Asian Development Bank & Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.
- Creswell, J.A. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. London: SAGE Publication, International Educational and Profesional
- Dye, Thomas R. (1984). *Understanding Public Policy*. ---.
- Dykstra, Clarence A. (1939). "[The Quest for Responsibility](https://doi.org/10.2307/1949761)" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 33, No. 1. [Online]. Tersedia : [doi:10.2307/1949761](https://doi.org/10.2307/1949761). <http://jstor.org/stable/1949761>. [10 April 2011].
- Engkoswara dalam Ali dkk. (2007). *Pendidikan Berbasis Unggulan Lokal dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana.
- Fattah, Nanang dan Nurdin, Diding dalam Ali dkk. (2007). *Ekonomi Pendidikan dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press.
- Fischel, William A. (2008). "Educational Finance" dalam *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 2nd Edition.
- Fowler, Frances C. (2009). *Policy Studies for Educational Leaders An Introduction Third Edition*. Boston : Pearson Education Inc.
- Gaffar, Fakry dan Nurdin, Diding dalam Ali dkk. (2007). *Manajemen Pendidikan dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press
- Goetz, Judith Preisle & LeCompte, Margareth Diane. (1984). *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research*. London: Academic Press Inc.
- Goldin and Katz. (----). "Education Policy Failings in Historical Perspective" dalam *Economis Journal Watch Volume 6 (1)*. ----.
- Guba, E.G. (1978). *Toward A Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation*. California : University of California.
- Grindle, Merilee S. (1990). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton Press.
- Hannaway, Jane dan Woodroffe, Nicola. (2003). "Policy Instruments in Education" dalam *Review of Research in Education 27*, 2003. Washington DC : AERA.
- Hartley, Harry J. (1968). *Educational Planning-Programming-Budgeting*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc
- Haryadi, Dedi. (2010). *Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kecamatan Tingkat Provinsi Cluster Kota*. Bandung : ---.
- Heryawan, Ahmad. (2010). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2009*. Bandung : Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Hendarto, Agung & Suhendar, Nizar. (2002). *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*. Jakarta : Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Hill et. al. (2004). *Strategic Management an Integrated Approach*. Milton : Wiley & Houghton Mifflin.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (1996). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Depdiknas-Bappenas-Adicita Karya Nusa

- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kelompok Konsentrasi Pendidikan Dasar dan Menengah (S3 Reguler). (2009). *Studi Tentang Impelementasi Kebijakan Komite Sekolah dan BP3 Sebagai Perbandingan di Kabupaten Bandung*. Tugas Mata Kuliah Seminar Kajian Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. H. Azis Wahab, MA. Laporan Studi Lapangan. Bandung : Sekolah Pascasarjana UPI.
- Lee, Jaekyung & Kwong, Kenneth. (2004). "The Impact of Accountability on Racial and Economic Equity : Concidering Both School Resources and Achievement Aoutcomes" dalam *American Educational Research Journal*, winter 2004, Volume 4 No. 4.
- Miller, Robert J. dan Rowan, Brian. (2006). "Effects of Organic Management on Students Achievements" dalam *American Educational Research Journal Summer 2006 Volume 43 Number 2*.
- Morrison. (2004). *Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*. Tangerang : Ramdina Prakarsa.
- Mulyasa. (2003). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Patta, Johnny. (2008). *Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Pembangunan di Propinsi Jawa Barat 2008-2013 dalam Warta Bapeda Propinsi Jawa Barat Volume 13 No. /April-Juni 2008*. Bandung : Subid Pendataan Bidang Monitoring dan Evaluasi Bapeda Provinsi Jawa Barat.
- Poerbakawatja, Soegarda dan Harahap, Abu Hasyim. (1981). *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Peraturan Perundang-undangan/Produk Kebijakan
- Rondinelli, Dennis A. & G. Shabbir Cheema. (1988). "Implementing Decentralization Policies: an Introduction" dalam Cheema dan Rondinelli, *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, California : Sage Publication Inc.
- Rubin, Irene S. (1992). "Budgeting: Theory, Concept, Methods and Issues" dalam Rabin, Jack (ed.). *Handbook of Public Budgeting*. New York : Marcel Dekker, Inc.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*. London : British Library Cataloguing in Publication Data.
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Sumantri, Mulyani dalam Ali dkk. (2007). *Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Schedler, Andreas. (1999). "Conceptualizing Accountability" dalam Andreas Schedler, Larry Diamond, Marc F. Plattner. *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Sergiovani, Thomas J. et. al. (1980). *Educational Governance and Administration*. Engelwood Cliffs, New Jersey :Prentice Hall,Inc.
- Sinclair, Amanda (1995). "The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses" dalam *Accounting, Organizations and Society* 20 (2/3).---
- Subardiman et. al. (2009). "Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan. Analisis Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)" . Laporan Studi Lapangan. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

- Sugiarto, Soleh et. al. (2009). *Memori DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004-2009*. Bandung : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Sumantri, Agus. (2010). *Efektivitas Implementasi Manajemen Sekolah Bermutu. (Studi tentang Hubungan antar Komponen Sekolah Bermutu dengan Mutu Kinerja SMPN RSBI di Wilayah Jawa Barat)*. Disertasi. Bandung : Sekolah Pascasarjana UPI.
- Sumianto, Toto. (2008). "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Manajemen Pendidikan: Studi Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Relevan di Kabupaten Majalengka". Disertasi. Bandung : Pendidikan Pasca Sarjana UPI.
- Sunu, Arya. (2011). *Pendidikan Multikultural di Provinsi Bali*. Disertasi. Bandung : Sekolah Pascasarjana UPI.
- Superfine, Benjamin Michael (2009). "The Evolving Role of The Courts in Educational Policy : The Tension Between Judicial, Scientific and Democratic Decision Making in *Kitzmiller v. Dover*" dalam *American Educational Research Journal* Volume 46 Number 4, December 2009. Washington DC : AERA & SAGE.
- Surakhmad, Winarno. (2009). "Kebijakan Pendidikan Yang Mengindonesiakan". Artikel. Koran Tempo, 1 Desember 2009.
- Syafioeddin, Irianto Machfud Sidik.(2009). *Pembangunan Pendidikan Berbasis Kewilayahan di Tingkat Kabupaten (Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Indramayu dalam Konteks Otonomi Daerah)*. Disertasi. Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syaukani et. al. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- The World Bank.(2009). *Education For All (EFA)*. Artikel. [Online] Tersedia :
- Wikipedia, the free encyclopedia. (2010). *Budget*. Artikel. [Online]. Tersedia : <http://en.wikipedia.org/wiki/Budgeting>. [11 Desember 2010].
- Thomas, J. Alan. (1971). *The Productive School*. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Tjiptowardojo, Djoemad. (2010). *Kebijakan Publik dalam Perspektif Demokrasi*. Bandung: STIA Bagasasi.
- UI Haq, Mahbub et al. (1985). *Human Development Report 1985*. New York : Oxford University Press
- Wachyan, Abdul et. al. (2002). *Rencana Pembangunan Regional Makro Pendidikan Jawa Barat*. Bandung : Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Wiseman, Alexander E. (2010). *The Uses of Evidence for Education Policy Making : Global Context and International Trends dalam What Counts as Evidence in Educational Setting ? Rethinking Equity, Diversity dan Reform in the 21st Century, Review of Research in Education*. Washington DC : American Educational Research Association and SAGE.
- Zarkasy, Wahyudin. (2010). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2009*. Bandung : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan.
- . (...). *Management in Education*. London : Kogan Page Educational Management Series.
- . (1999). *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- . (2001). *The Encyclopedia Americana International Edition Vol. 4 dan Vol. 22*. Danbury, Connecticut : Grolier Incorporated.

- . (2003). Produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Tahun 2003. Keputusan Dewan dan Pimpinan Dewan 2003. Bandung : Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat.
- . (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Kaldera.
- . (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) .
- . (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta : Eka Jaya.
- . (2005). Berita Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 2005 Seri E Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
- . (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar N---. (2008). Berita Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 2008 Seri E Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
- . (2008). Berita Daerah Provinsi Jawa Barat No. 54 2008 Seri E Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
- . (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- . (2005). Selayang Pandang Indramayu in Harmony. Indramayu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.
- . (2010). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Bandung : Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- . (2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-201. Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Bandung : Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- . (2010). Laporan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2009. Bandung : DPRD Provinsi Jawa Barat